

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan suatu laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran atas sumber dan yang berasal dari pemerintah pusat. Laporan keuangan pemerintah akan di periksa Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk menjamin keandalan atas informasi yang terkandung di dalamnya, kemudian laporan keuangan tersebut akan disampaikan kepada lembaga perwakilan (DPR/DPRD) yang nanti nya akan dipublikasikan kepada masyarakat sebagai dasar menilai kinerja pemerintah.

Pemerintah sebagai entitas pelapor (*reporting entity*) berkewajiban menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kendali sumber-sumber yang signifikan dan penggunaan sumber-sumber tersebut oleh pemerintah dapat berdampak luas terhadap kesejahteraan dan ekonomi rakyat serta terdapat pemisahan antara manajemen dan kepemilikan sumber-sumber tersebut (Partono, 2000).

Laporan keuangan pemerintah yang disajikan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa komponen yang harus dilaporkan terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,

Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan (Pratolo, dkk 2016).

Laporan keuangan dalam penyajiannya harus disadari bahwa laporan keuangan tersebut akan dipergunakan oleh beberapa pihak, terkait dengan nilai informasi yang terkandung di dalamnya. Salah satu tujuannya adalah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Agar informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan bermanfaat untuk para pemakainya, maka laporan keuangan harus disajikan secara tepat, baik tepat dalam penyajiannya maupun tepat waktu dalam pelaporannya.

Indikator ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia di atur dalam PP No 71 tahun 2010 dimana laporan keuangan pemerintah daerah harus diserahkan kepada BPK 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir atau tepatnya pada tanggal 31 maret. Dengan adanya batas waktu penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah kepada BPK mengharuskan pemerintah daerah dalam memaksimalkan kinerja setiap aspek yang ada di lembaganya, jika pemerintah daerah belum mampu memaksimalkan kinerjanya, maka hal ini sangat mempengaruhi opini yang akan diterimanya dari BPK terhadap laporan keuangannya. Laporan keuangan pemerintah daerah akan memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan beberapa indikator yang harus terpenuhi, salah satunya adalah indikator ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah.

Pemerintah Kabupaten Pringsewu menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI. Opini WTP ini kali pertama bagi

Pemerintah Kabupaten Pringsewu Lampung. Opini ini diraih berdasarkan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015 (Budiawan R. D 2016).

Tabel 1.1
Opini Audit LKPD Kabupaten Pringsewu

No.	Tahun	Opini Audit
1	2011	WDP
2	2012	WDP
3	2013	WDP
4	2014	WDP
5	2015	WTP
6	2016	WTP

Sumber: Budiawan R. D (2016).

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip tepat waktu, maka kompetensi sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem akuntansi sangatlah dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten dan memahami konsep akuntansi pemerintahan.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Iphan, dkk (2014) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan, sebab jika seorang pegawai diberikan tugas sesuai dengan latar belakang pendidikannya atau dapat dikatakan sesuai dengan keahliannya, maka tugas tersebut akan diselesaikan dengan tepat waktu. Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Witono (2014), Desmiyawati (2014) juga membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Namun,

hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukri (2017) dan Rachmawati (2014) yang menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Penerapan SIMDA mungkin hal lain yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu atas pelaporan keuangan di pemerintahan. Sistem ini dikembangkan guna membantu pemerintah dalam rangka mewujudkan kegiatan pemerintahan yang efektif, efisien, dan ekonomis mulai dari penyusunan anggaran hingga pertanggungjawaban APBD. Penelitian yang dilakukan oleh Amiani (2014), Desmiyawati (2014), Yunina dan Wahyuni (2013) menyatakan bahwa SIMDA berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, artinya dengan penggunaan teknologi informasi dalam penyusunan laporan keuangan maka dapat meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi dalam penyusunan laporan keuangan. Namun, hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati (2014), Mustafa, dkk (2016) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh negative terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hal terakhir yang diperkirakan dapat mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Pada tahun 2008, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, PP tersebut menerangkan bahwa tujuan

SPIP adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara, keandalan Laporan Keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut penelitian Iphan, dkk (2014) Yunina dan Wahyuni (2013) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Witono (2014), Mustafa, dkk (2016) juga membuktikan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Sebab, jika pengendalian intern pemerintah dijalankan dengan tepat pada setiap SKPD maka kualitas laporan keuangan menjadi lebih baik, dan tentunya dengan kualitas laporan keuangan yang baik maka penyajiannya dapat dilakukan tepat waktu.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian dilakukan pada salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di provinsi Lampung, sehingga penelitian ini di beri judul : **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), dan Sistem Pengendalian Intenal Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Pringsewu)”**. Penelitian ini merupakan replikasi penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Shinta Permata Sari dan Banu Witono pada tahun 2014 dengan obyek penelitian Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Surakarta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut

adalah pada obyek yang diteliti. Replikasi tersebut dilakukan karena masih banyaknya hasil penelitian yang belum konsisten.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah ini bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas dari permasalahan yang ada untuk memudahkan penelitian. Dari berbagai faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah maka penelitian ini hanya melakukan pengujian pada tiga variabel membatasi variabel yaitu kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem informasi manajemen daerah dan sistem pengendalian internal untuk membatasi penelitian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah penerapan SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah di tuliskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris:

1. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2. Pengaruh implementasi penerapan SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
3. Pengaruh Efektifitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

E. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang membaca dan para pihak yang terkait di dalam penelitian. Manfaat penelitian ini adalah:

- a. Bagi Praktisi

Sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan, ikut serta membantu dalam praktik akuntansi di Indonesia di masa yang akan datang, dan memberikan wawasan serta wacana kepada pihak SKPD dalam mengembangkan sumber daya manusia, sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) dan sistem pengendalian internal dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi akuntabilitas keuangan.

b. Bagi Akademisi/Secara Teoritis

Hasil penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat membantu dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi pada umumnya dan akuntansi pemerintahan pada khususnya.